



**PERATURAN BUPATI
No. 43 Tahun 2025**

TENTANG

PERUBAHAN

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
RKPD
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 -**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - b. bahwa agar penjabaran dari program kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah selaras dengan yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


SETDA
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025.**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD


Bab ini memuat seluruh dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkong;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

**BAB III
PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai penyelarasan atas Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.


BUPATI PURBALINGGA,
[Signature]
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
[Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 33

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 3 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025..... | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 20 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 29 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 32 |
| BAB IV PENUTUP | 44 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel II. 1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah..... | 11 |
| Tabel II. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025..... | 22 |
| Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Program pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025..... | 24 |
| Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025..... | 32 |
| Tabel III. 2 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025..... | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengalami perubahan diiringi dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat

daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2025 dilakukan perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD;
- b. adanya penambahan sasaran kegiatan;
- c. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja;
- d. adanya perubahan target indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (output);

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 disusun dengan mendasar pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD 2024. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS) Tahun 2025, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Bappelitbangda 2025 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bappelitbangda 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja OPD Tahun 2025 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian kinerja Renja s/d Triwulan II tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan, dengan memetakan program/ kegiatan yang belum memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II. 1 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (Th 2025) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD pada Triwulan (Th 2025) | | | | | | | | | | Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Th 2025) (%) | | OPD Penanggungjawab |
|----|---|---------------------------------------|--|--------|---|---------------|--|---------------|-----|---------------|-----|-----|----|-----|--------------|---------------|--|-------|---------------------|
| | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | TOTAL | | | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | | -5 | | -6 | | -7 | | -8 | | -9 | | (10=6+7+8+9) | | (11=10/5*100) | | -12 |
| | | | Indikator | Satuan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda. | | Nilai SAKIP Bappelitbangda | Angka | 79 | 5.554.563.000 | - | 1.353.544.888 | - | 1.440.720.018 | | | | | NA | 2.794.264.906 | 0 | 50,31 | Bappelitbangda |
| 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Persen | 100 | 108.000.000 | 100 | 1.620.000 | 100 | - | | | | | 100 | 1.620.000 | 100 | 1,5 | Bappelitbangda |
| | | | Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 4.604.916.000 | 100 | 1.196.448.810 | 100 | 1.290.297.211 | | | | | 100 | 2.486.746.021 | 100 | 54 | Bappelitbangda |
| | | | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | Persen | 100 | 5.200.000 | 100 | 453.200 | - | - | | | | | 100 | 453.200 | 0 | 8,72 | Bappelitbangda |
| | | | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 552.280.000 | 100 | 109.849.876 | 100 | 97.730.007 | | | | | 100 | 207.579.883 | 100 | 37,59 | Bappelitbangda |
| | | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | Persen | 100 | 284.167.000 | 100 | 45.173.002 | 100 | 52.692.800 | | | | | 100 | 97.865.802 | 100 | 34,44 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|--|--|-----|---------------|-----|-------|----------------|
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | Pers en | 100 | 108.000.000 | 100 | 1.620.000 | 100 | - | | | | | 100 | 1.620.000 | 100 | 1,5 | Bappelitbangda |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dok ume n | 2 | 5.000.000 | - | 1.114.000 | - | - | | | | | 2 | 1.114.000 | 0 | 22,28 | Bappelitbangda |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB) | Dok ume n | 5 | 103.000.000 | 3 | 506.000 | 1 | - | | | | | 8 | 506.000 | 80 | 0,49 | Bappelitbangda |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti | Pers en | 100 | 4.604.916.000 | 100 | 1.196.448.810 | 100 | 1.290.297.211 | | | | | 100 | 2.486.746.021 | 100 | 54 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Ora ng | 31 | 4.344.516.000 | 31 | 1.171.574.510 | 31 | 1.277.416.090 | | | | | 31 | 2.448.990.600 | 93 | 56,37 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dok ume n | 99 | 205.760.000 | 28 | 23.401.300 | 18 | 12.881.121 | | | | | 46 | 36.282.421 | 46 | 17,63 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Dok ume n | 600 | 54.640.000 | 37 | 1.473.000 | 158 | - | | | | | 195 | 1.473.000 | 33 | 2,7 | Bappelitbangda |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | Pers en | 100 | 5.200.000 | 100 | 453.200 | - | - | | | | | 100 | 453.200 | 100 | 8,72 | Bappelitbangda |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | Lap oran | 4 | 5.200.000 | 1 | 453.200 | - | - | | | | | 1 | 453.200 | 25 | 8,72 | Bappelitbangda |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya | Ora ng | 43 | 75.000.000 | - | 5.528.800 | - | 1.800.000 | | | | | - | 7.328.800 | 0 | 9,77 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---|---|---|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 11 | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Bappelitbangda | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 43 | 60.000.000 | - | 5.528.800 | - | 1.800.000 | - | - | - | 7.328.800 | 0 | 12,21 | Bappelitbangda | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | Bulan | 12 | 70.962.000 | 3 | 12.406.900 | 2 | 11.172.100 | | | | 5 | 23.579.000 | 42 | 33,23 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 5 | 8.800.000 | 5 | 1.862.000 | - | 1.054.000 | | | | 5 | 2.916.000 | 100 | 33,14 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 9 | 24.800.000 | 6 | 5.046.900 | 3 | 2.930.100 | | | | 9 | 7.977.000 | 100 | 32,17 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 996.000 | 3 | 190.000 | 2 | 285.000 | | | | 5 | 475.000 | 42 | 47,69 | Bappelitbangda |
| | | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 10.500.000 | 3 | 1.908.000 | 2 | 2.303.000 | | | | 5 | 4.211.000 | 42 | 40,1 | Bappelitbangda |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 11.466.000 | 3 | 3.400.000 | 2 | 4.600.000 | | | | 5 | 8.000.000 | 42 | 69,77 | Bappelitbangda |
| | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Dokumen | 24 | 14.400.000 | 6 | - | 4 | - | | | | 10 | - | 42 | 0 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|----|-------------|----|------------|---|------------|--|--|--|----|-------------|----|-------|----------------|
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | 12 | 406.318.000 | 3 | 91.914.176 | 2 | 84.757.907 | | | | 5 | 176.672.083 | 42 | 43,48 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 6 | 630.000 | - | - | 1 | - | | | | 1 | - | 17 | 0 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 70.640.000 | 3 | 16.745.939 | 2 | 15.581.046 | | | | 5 | 32.326.985 | 42 | 45,76 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa | Laporan | 1 | 10.622.000 | - | - | - | - | | | | - | - | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Laporan | 12 | 324.426.000 | 3 | 75.168.237 | 2 | 69.176.861 | | | | 5 | 144.345.098 | 42 | 44,49 | Bappelitbangda |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | 12 | 284.167.000 | 3 | 45.173.002 | 2 | 52.692.800 | | | | 5 | 97.865.802 | 42 | 34,44 | Bappelitbangda |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 29 | 254.167.000 | 14 | 41.451.002 | 8 | 49.812.800 | | | | 22 | 91.263.802 | 76 | 35,91 | Bappelitbangda |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara | Unit | 10 | 10.000.000 | 6 | 3.600.000 | - | 2.880.000 | | | | 6 | 6.480.000 | 60 | 64,8 | Bappelitbangda |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | - | 122.000 | - | - | | | | - | 122.000 | 0 | 0,61 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|--|--|--|--|--------|-------------|--------|-------|----------------|
| 2 | Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan | | tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD | Pers en | 96 | 1.215.355.000 | - | 97.784.683 | - | 156.987.387 | | | | | - | 254.772.070 | 0 | 20,96 | Bappelitbangda |
| 2 | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan | Pers en | 100 | 487.500.000 | 100 | 33.907.000 | 100 | 81.439.432 | | | | | 200 | 115.346.432 | 200 | 23,66 | Bappelitbangda |
| | | | Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program | Pers en | 82,33 | 48.025.000 | - | 7.415.000 | - | 675.000 | | | | | - | 8.090.000 | 0 | 16,85 | Bappelitbangda |
| | | | Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu | Pers en | 100 | 56.266.000 | 93,62 | 1.765.000 | 53,19 | - | | | | | 146,81 | 1.765.000 | 146,81 | 3,14 | Bappelitbangda |
| | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan | Pers en | 100 | 487.500.000 | 100 | 33.907.000 | 100 | 81.439.432 | | | | | 200 | 115.346.432 | 200 | 23,66 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 284 | 47.880.000 | 284 | 2.255.000 | 284 | 620.000 | | | | | 284 | 2.875.000 | 100 | 6 | Bappelitbangda |
| | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah berita acara musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 5 | 199.500.000 | 4 | 27.109.000 | 1 | 59.231.932 | | | | | 5 | 86.340.932 | 100 | 43,28 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 5 | 240.120.000 | 2 | 4.543.000 | 1 | 21.587.500 | | | | | 3 | 26.130.500 | 60 | 10,88 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan | Pers en | 100 | 48.025.000 | - | 7.415.000 | - | 675.000 | | | | | - | 8.090.000 | 0 | 16,85 | Bappelitbangda |
| | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah) | Dok ume n | 1 | 48.025.000 | - | 7.415.000 | - | 675.000 | | | | | - | 8.090.000 | 0 | 16,85 | Bappelitbangda |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase dokumen evaluasi OPD yang disusun | Pers en | 100 | 56.266.000 | 93.62 | 1.765.000 | 53.19 | - | | | | | 53.19 | 1.765.000 | 53.19 | 3,14 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Lap oran | 2 | 22.535.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah | Lap oran | 4 | 33.731.000 | 1 | 1.765.000 | 1 | - | | | | | 2 | 1.765.000 | 50 | 5,23 | Bappelitbangda |
| 3 | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Pers en | 97.05 | 274.211.000 | - | 28.644.000 | - | 36.623.888 | | | | | - | 65.267.888 | 0 | 23,8 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-------|-------------|---|------------|---|------------|--|--|--|--|---|------------|----|-------|----------------|
| | | | Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang ekonomi | Pers en | 95.12 | 156.329.000 | - | 9.551.000 | - | 12.836.600 | | | | | - | 22.387.600 | 0 | 14,32 | Bappelitbangda |
| | | | Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | Pers en | 94.74 | 193.024.000 | - | 16.502.683 | - | 25.412.467 | | | | | - | 41.915.150 | 0 | 21,71 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Dok ume n | 34 | 274.211.000 | - | 28.644.000 | - | 36.623.888 | | | | | - | 65.267.888 | 0 | 23,8 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dok ume n | 28 | 93.315.000 | - | 7.486.500 | - | 12.902.888 | | | | | - | 20.389.388 | 0 | 21,85 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dok ume n | 6 | 99.400.000 | - | 4.226.500 | - | 18.311.500 | | | | | - | 22.538.000 | 0 | 22,67 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RPJMD/RKPD pada bidang pembangunan manusia | Lap oran | 6 | 81.496.000 | - | 16.931.000 | 5 | 5.409.500 | | | | | 5 | 22.340.500 | 83 | 27,41 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---|-------------|---|------------|---|------------|--|--|--|--|---|------------|----|-------|----------------|
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang perekonomian dan SDA | Dokumen | 6 | 156.329.000 | - | 9.551.000 | - | 12.836.600 | | | | | - | 22.387.600 | 0 | 14,32 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dokumen | 4 | 71.088.000 | - | 9.551.000 | - | 12.836.600 | | | | | - | 22.387.600 | 0 | 31,49 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian | Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RPJMD/RKPD pada bidang perekonomian | Laporan | 4 | 39.966.000 | - | - | 2 | - | | | | | 2 | - | 50 | 0 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dokumen | 2 | 45.275.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | Jumlah dokumen renja, renstra dan laporan kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan | Dokumen | 6 | 193.024.000 | - | 16.502.683 | - | 25.412.467 | | | | | - | 41.915.150 | 0 | 21,71 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dokumen | 2 | 71.850.000 | - | 5.560.300 | - | 18.423.467 | | | | | - | 23.983.767 | 0 | 33,38 | Bappelitbangda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|--------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|--|--|--|--|----------|------------------|----------|-------------|-----------------------|
| | | Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/reja dengan RPJMD/RKPD pada bidang infrastruktur | Laporan | 2 | 23.425.000 | - | 2.770.000 | 2 | 1.270.500 | | | | | 2 | 4.040.500 | 100 | 17,25 | Bappelitbangda |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Dokumen | 4 | 97.749.000 | - | 8.172.383 | - | 5.718.500 | | | | | - | 13.890.883 | 0 | 14,21 | Bappelitbangda |
| 3 | Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 76 | 474.913.000 | - | 4.230.000 | - | 2.612.000 | | | | | - | 6.842.000 | 0 | 1,44 | Bappelitbangda |
| 4 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan | Persen | 35.71 | 474.913.000 | - | 4.230.000 | - | 2.612.000 | | | | | - | 6.842.000 | 0 | 1,44 | Bappelitbangda |
| | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi | Inovasi | 70 | 474.913.000 | - | 4.230.000 | - | 2.612.000 | | | | | - | 6.842.000 | 0 | 1,44 | Bappelitbangda |
| | | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perencanaaan di bidang teknologi dan inovasi | Dokumen | 297 | 369.760.000 | 121 | 4.230.000 | 105 | 2.612.000 | | | | | 226 | 6.842.000 | 76 | 1,85 | Bappelitbangda |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan | Laporan | 2 | 105.153.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | 0 | 0 | Bappelitbangda |

Penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- Kolom 2 merupakan sasaran strategis Bappelitbangda yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.
- Kolom 3 merupakan kondisi program kegiatan sub kegiatan pemutahiran kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2025.
- Kolom 4 dan 5 merupakan kondisi indikator dan target kinerja bappelitbangda tahun 2025.
- Kolom 6 dan 7 merupakan realisasi kinerja dan anggaran triwulan I dan II tahun 2025.
- Kolom 10 dan 11 merupakan realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II dan capaian renstra 2025.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang sangat mendukung pelaksanaan perencanaan kinerja perangkat daerah seperti SIPD-RI, SI PAKIS BANGGA, SI INTAN dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan serta monev pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang dilakukan oleh ASN Bappelitbangda sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi urusan perencanaan dan penelitian. Tidak hanya faktor pendorong dalam pencapaian kinerja, Bappelitbangda pun menemukan hambatan-hambatan antara lain keterbatasan sumber daya, dalam hal ini terbatasnya anggaran, kuantitas personil, sarana dan prasarana yang digunakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian kinerja kelembagaan dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga

mendapatkan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran strategis yang telah ditetapkan membandingkan dengan realisasi kinerjanya. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel II. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025

| No. | Perangkat Daerah | Pernyataan Tujuan | Pernyataan Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD | Satuan | Target | Realisasi 2025 | | | | Sumber Indikator |
|-----|---|---|--|---|--------|--------|----------------|-------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | 2025 | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas | | Skor Perencanaan | Persen | 23 | NA | 21.86 | | | Tujuan RENSTRA |
| | | | Meningkatkan kualitas kelembagaan Bappelitbangda | Nilai SAKIP Bappelitbangda | Indeks | 79 | NA | NA | | | Sasaran RENSTRA |
| | | | Meningkatkan keselarasan dokumen Perencanaan | Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD | Persen | 97,5 | NA | NA | | | Sasaran RENSTRA |
| | | | Meningkatkan peran kelitbangan dalam pembangunan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100 | NA | NA | | | Sasaran RENSTRA |

Berdasarkan tabel di atas yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai, kondisi sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 pencapaian 4 (empat) indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator yang telah terisi yaitu Skor perencanaan SAKIP 2024 dengan nilai 22,84 atau dengan capaian 99,30% dan 3 (tiga) indikator belum dapat terisi karena realisasi kinerja dari ketiga indikator telah ditargetkan pada triwulan ke 3 dan 4 sesuai rencana aksi Bappelitbangda Tahun 2025 akan tetapi dalam pencapaian kinerja Bappelitbangda pelaksanaan kegiatan telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Tahun 2025, telah ditetapkan program dan kegiatan sesuai Perbup Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Program pada Renja Bappelitbangda Tahun 2025 secara rinci target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Program pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d Triwulan II Tahun 2025

| No | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | | | | OPD | RUMPUN |
|---|----------|--|--------|-------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | |
| 5.01 | | PERENCANAAN | | | | | | | | |
| 1.01.01 | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | BAPPELITBANGDA | PEMERINTAHAN |
| 1 | | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2 | | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |

| No | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | | | | OPD | RUMPUN |
|----------------|----------|--|--------|-------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 3 | | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4 | | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | persen | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 5 | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 5.01.02 | 2 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | BAPPELITBANGDA | PEMERINTAHAN |

| No | PROGRAM | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | | | | OPD | RUMPUN |
|----------------|---|--------|-------------|---|-------|-------|--------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | TW I | TW II | TW III | | |
| 1 | Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program | persen | 82.3 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu | persen | 100 | 93.62 | 53,19 | | | | |
| 3 | Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan | persen | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 5.01.03 | 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | BAPPELITBANGDA | PEMERINTAHAN |

| No | PROGRAM | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | | | | OPD | RUMPUN |
|----|---|--------|-------------|---|------|-------|--------|-----|--------|
| | | | | Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | TW I | TW II | TW III | | |
| 1 | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia | persen | 97.05 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi | persen | 95.12 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan | persen | 94.74 | 0 | 0 | | | | |

| No | PROGRAM | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | | | | OPD | RUMPUN |
|----------------|---|--------|-------------|---|------|-------|--------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | TW I | TW II | TW III | | |
| | Pengembangan Wilayah | | | | | | | | |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| 5.05.02 | 1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | BAPPELITBANGDA | PEMERINTAHAN |
| 1 | Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan | persen | 35.71 | 0 | 0 | | | | |

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat bahwa 12 (dua belas) indikator kinerja dari 4 (empat) program, 4 (empat) indikator telah tercapai dan 8 (delapan) indikator lainnya belum menunjukkan adanya kinerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan proses perencanaan pembangunan daerah harus sinkron mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta beberapa indikator kinerja program yang ditargetkan pada triwulan III dan IV.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bappelitbangda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal pagu urusan, pagu pada program prioritas);
- b. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
- c. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- a. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan isu-isu tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkembang, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial;
2. Masih perlunya peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD), konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Penyelarasan program pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
5. Penyusunan peta jalan kelitbang sebagai pedoman dokumen perencanaan pembangunan berbasis litbang.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029, mendasari hal tersebut perangkat daerah untuk dapat menyesuaikan target Perubahan Renja PD 2025 sesuai Renstra 2025-2029 untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang tertuang pada RPJMD 2025-2029 seperti hanya target tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2025 | SATUAN |
|---|--|--|-------------|--------|
| Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | | IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah) | 73,15 | ANGKA |
| | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan relevan | Skor Perencanaan dalam SAKIP | 23,34 | PERSEN |
| | Meningkatnya kapabilitas riset dan inovasi daerah | Kapabilitas Inovasi | 2,4 | PERSEN |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Bappelitbangda | 76,5 | ANGKA |

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif secara rinci disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel III. 2 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PAGU INDIKATIF BAPPELITBANGDA KAB. PURBALINGGA TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/ Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | 7.547.823.000,00 | 7.244.831.000,00 | 6.378.958.000,00 | -1.168.865.000,00 | | | | | | | 7.496.823.000,00 | |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 7.547.823.000,00 | 7.244.831.000,00 | 6.378.958.000,00 | -1.168.865.000,00 | | | | | | | 7.496.823.000,00 | | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | 6.566.910.000,00 | 6.769.918.000,00 | 6.246.298.000,00 | -320.612.000,00 | | | | | | | 6.515.910.000,00 | | |
| 1. | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | | | | 100 persen | 100 persen | 5.271.555.000,00 | 5.554.563.000,00 | 5.400.486.000,00 | 49.000.000,00 | | | | | | | 5.320.555.000,00 | | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.000.000,00 | 108.000.000,00 | 104.050.000,00 | 96.050.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD dan Masyarakat | | 8.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 5.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 3.000.000,00 | 103.000.000,00 | 101.550.000,00 | 98.550.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.427.908.000,00 | 4.604.916.000,00 | 4.448.400.000,00 | 20.492.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | ASN | | 4.427.908.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.167.508.000,00 | 4.344.516.000,00 | 4.285.349.000,00 | 117.841.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 4.167.508.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 210 Dokumen | 210 Dokumen | 220.000.000,00 | 205.760.000,00 | 110.125.000,00 | -109.875.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 220.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 600 Dokumen | 600 Dokumen | 40.400.000,00 | 54.640.000,00 | 52.926.000,00 | 12.526.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 40.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.550.000,00 | -650.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 5.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|-------------------------|---|--|-----|----------------|--|
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 4.550.000,00 | -650.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | 5.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya | | | | 43 Orang | 43 Orang | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 60.880.000,00 | -14.120.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | ASN | 145.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 11 Orang | 11 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIK ATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkuran g (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 42 Orang | 60 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 50.880.000,00 | -9.120.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 130.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 64.962.000,00 | 70.962.000,00 | 71.118.000,00 | 6.156.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | BAPPELITBANG DA | | 70.962.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 8.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 20.431.000,00 | -4.369.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 24.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 996.000,00 | 996.000,00 | 950.000,00 | -46.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 996.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 8.271.000,00 | -2.229.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 10.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.466.000,00 | 11.466.000,00 | 18.266.000,00 | 6.800.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 11.466.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 2 Dokumen | 8.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 14.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | | - | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | - | | 13.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|-------------------------|--|--|-----------------|--|----------------|--|
| 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 13.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 406.318.000,00 | 406.318.000,00 | 406.318.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | BAPPELITBANG DA | | 406.318.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 630.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.640.000,00 | 70.640.000,00 | 70.640.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 70.640.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.622.000,00 | 10.622.000,00 | 10.622.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 10.622.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 14 Laporan | 12 Laporan | 324.426.000,00 | 324.426.000,00 | 324.426.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 324.426.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 284.167.000,00 | 284.167.000,00 | 292.170.000,00 | 8.003.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | ASET BAPPELITBANG DA | | 244.167.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 29 Unit | 29 Unit | 254.167.000,00 | 254.167.000,00 | 259.170.000,00 | 5.003.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 214.167.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 2. | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan | | | | 100 persen | 100 persen | 571.791.000,00 | 591.791.000,00 | 526.805.000,00 | 0,00 | | | | | | | 571.791.000,00 | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan | | | | 100 Persen | 100 Persen | 467.500.000,00 | 487.500.000,00 | 297.830.000,00 | -169.670.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD dan Masyarakat | | 467.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | | | 284 Dokumen | 45 Dokumen | 27.880.000,00 | 47.880.000,00 | 12.860.000,00 | -15.020.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 27.880.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|----------------|--|
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 199.500.000,00 | 199.500.000,00 | 86.600.000,00 | -112.900.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | 199.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 240.120.000,00 | 240.120.000,00 | 198.370.000,00 | -41.750.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | 240.120.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Prosentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 28.025.000,00 | 48.025.000,00 | 53.317.000,00 | 25.292.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 28.025.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.025.000,00 | 48.025.000,00 | 53.317.000,00 | 25.292.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 28.025.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun</i> | | | | 100 Persen | 100 Persen | 76.266.000,00 | 56.266.000,00 | 175.658.000,00 | 99.392.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 76.266.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i> | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 22.535.000,00 | 22.535.000,00 | 151.953.000,00 | 129.418.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 22.535.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i> | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 53.731.000,00 | 33.731.000,00 | 23.705.000,00 | -30.026.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 53.731.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 3. | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia | | | | 98,23 persen | 98,23 persen | 723.564.000,00 | 623.564.000,00 | 319.007.000,00 | -100.000.000,00 | | | | | | | 623.564.000,00 | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | <i>Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i> | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 374.211.000,00 | 274.211.000,00 | 148.901.000,00 | -225.310.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 274.211.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | | | | 28 Dokumen | 3 Dokumen | 93.315.000,00 | 93.315.000,00 | 49.191.000,00 | -44.124.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 93.315.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> | | | | 5 Dokumen | 3 Dokumen | 99.400.000,00 | 99.400.000,00 | 54.281.000,00 | -45.119.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 99.400.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i> | | | | 5 Laporan | 10 Laporan | 181.496.000,00 | 81.496.000,00 | 45.429.000,00 | -136.067.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 81.496.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|-------------------------|--|--|-----|--|----------------|--|
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 156.329.000,00 | 156.329.000,00 | 87.748.000,00 | -68.581.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 156.329.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 71.088.000,00 | 71.088.000,00 | 35.774.000,00 | -35.314.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 71.088.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD | REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELU M | SESUDA H | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | 2 Laporan | 12 Laporan | 39.966.000,00 | 39.966.000,00 | 24.889.000,00 | -15.077.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 39.966.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 45.275.000,00 | 45.275.000,00 | 27.085.000,00 | -18.190.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 45.275.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 193.024.000,00 | 193.024.000,00 | 82.358.000,00 | -110.666.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD | | 193.024.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 | 41.155.000,00 | -30.695.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 71.850.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 2 Laporan | 10 Laporan | 23.425.000,00 | 23.425.000,00 | 12.673.000,00 | -10.752.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 23.425.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 97.749.000,00 | 97.749.000,00 | 28.530.000,00 | -69.219.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 97.749.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 980.913.000,00 | 474.913.000,00 | 132.660.000,00 | -848.253.000,00 | | | | | | | 980.913.000,00 | |
| 1. | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan | | | | 89,71 persen | 90 persen | 980.913.000,00 | 474.913.000,00 | 132.660.000,00 | 0,00 | | | | | | | 980.913.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|--|
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi dan Invensi yang di fasilitasi | | | | 70 Inovasi | 70 Inovasi | 980.913.000,00 | 474.913.000,00 | 132.660.000,00 | -848.253.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | OPD dan Masyarakat | | 980.913.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04.000 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 321 Dokumen | 321 Dokumen | 369.760.000,00 | 369.760.000,00 | 35.964.000,00 | -333.796.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 369.760.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04.000 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 611.153.000,00 | 105.153.000,00 | 96.696.000,00 | -514.457.000,00 | Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik | | | 611.153.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| J U M L A H | | | | | | | | 7.547.823.000,00 | 7.244.831.000,00 | 6.378.958.000,00 | 7.745.136.000,00 | | | | | | | 7.496.823.000,00 | |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan ,Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DI KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001